

# **ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

*(Studi Pada Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*

Oleh

**AKBAR Z. MAMONTO**

S2114014

**S K R I P S I**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(*Studi Pada Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*)

Oleh

AKBAR Z. MAMONTO

S2114014

### S K R I P S I

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar sarjana dan telah disetujui oleh tim pembimbing  
Gorontalo, 27 November 2021

#### Pembimbing I

Dr.Arman,S.Sos.,M.Si  
NIDN : 0913078602

#### Pembimbing II

Marten Nusi S.IP.,MAP  
NIDN : 0901038502

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP  
NIDN: 0924076701

## HALAMAN PERSETUJUAN

### ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(*Studi Pada Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*)

Oleh

AKBAR Z. MAMONTO

S2114014

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 27 November 2021

Dan di nyatakan telah memenuhi persyaratan

1. Dr. Fatma M. Ngabito. S.IP., M.AP
2. Darmawati Abdul Razak. S.IP.,M.AP
3. Sandi Prahara. ST.,M.Si
4. Dr. Arman. S.Sos.,M.Si
5. Marten Nusi. S.IP., M.AP

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. Arman. S.Sos.,M.Si  
NIDN: 0913078602

Ketua Program  
Studi Ilmu Pemerintahan



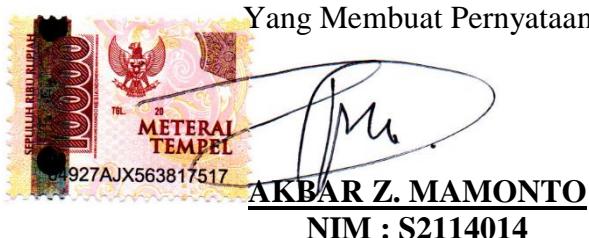
Darmawati Abdul Razak. S.IP., M.AP  
NIDN: 0924076701

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar Akademik (Sarjana, Magister ataupun Doktor ) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya .
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing .
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama yang dicantukam dalam daftar pustaka.
4. Peryataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini,serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku di perguruan tinggi ini .

Gorontalo, 27 November 2021  
Yang Membuat Pernyataan



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Sesungguhnya allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang merubah diri mereka sendiri

**(Q.s. Ar Ra'd : 11)**

Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya

**(Q.s. An Najm : 39)**

Waidha batastum batastum yabarin “ *Kesabaran itu tidak ada batasnya* ”

*Intelligence plus character -that is the goal of true education (Martin Luther King Jr)*

Hidup adalah perjuangan maka menyerah bukanlah penyelesaian karena kegagalan merupakan sebagian kecil menuju jalan kesuksesan (*penulis*)

### **PERSEMBAHAN**

*Kepada :*

1. Kedua orangtua ku tercinta bapak Sahlan Mamonto S.Ag Dan Ibu Wahidah Mahadin
2. Alm. Kakek Mohammad Mahadin Dan Nenek Munira Sumenda
3. Istriku Firly F Manuhabel S.Pi Dan Putraku Cahyo Cakra Mamonto
4. Keluarga Tercinta
5. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan
6. Teman-Teman Seperjuangan
7. Almamaterku Tercinta Universitas Ichsan Gorontalo

## **ABSTRACT**

**AKBAR Z . MAMONTO. S2114014. THE ANALYSIS OF THE VILLAGE HEAD'S ROLE IN COMMUNITY EMPOWERMENT (A STUDY AT KUHANGA VILLAGE, BINTAUNA DISTRICT, NORTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY**

)

*This study aims to determine the role of the village head in community empowerment in Kuhanga Village, Bintauna District, North Bolaang Mongondow Regency. This study is conducted with a qualitative method. The data collection technique uses interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is through a path analysis approach that puts forward descriptive narrative aspects. The results of the study indicate that the village head's role in the community empowerment program at Kuhanga Village is measured through three indicators of the theory or concept of the role. The village head has carried it out well. The role as a mediator or building a structural and social relationship with the village head has been running following the basic concept of the village head's role. It starts from the role amongst individuals, conveying information role through decision-makers role. The recommendation given by the researcher is that the village head can continue to be committed to carrying out his role in every program launched to realize the success of the program's goals. The support of local village government officials must also continue to be with the village head through motivation or persuasive communication, to be able to improve personal and institutional leadership which will have an impact on a good and maximum assessment of the government above it and the community the village head leads.*

*Keywords: village head's role, community empowerment*

## ABSTRAK

### **AKBAR Z. MAMONTO. S2114014. ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA DESA KUHANGA, KECAMATAN BINTAUNA, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA)**

Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan analisis jalur yang mengedepankan aspek narasi deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan peran kepala desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Kuhanga secara umum jika diukur melalui tiga indikator dari teori atau konsep peran, maka terlihat kepala desa telah menjalankannya dengan cukup baik. Peran sebagai penghubung atau membangun hubungan secara struktural dan sosial dengan lingkungan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi konsep dasar dari peran personal kepala desa. Mulai dari peran antara pribadi, peran penyampaian informasi, sampai dengan peran pengambil keputusan. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah kepala desa dapat terus berkomitmen dalam menjalankan perannya dalam setiap program yang dicanangkan untuk mewujudkan keberhasilan tujuan program. Dukungan aparat pemerintah desa setempat juga harus terus ada pada kepala desa melalui motivasi atau komunikasi persuasif, sehingga mampu meningkatkan kepemimpinan personal dan kelembagaan yang akan bedampak pada penilaian yang baik dan maksimal dari pemerintahan di atasnya dan masyarakat yang dipimpinnya.

Kata kunci: peran kepala desa, pemberdayaan masyarakat

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha esa Allah SWT karna berkat dan rahmat nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

### **“ Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”**

(Studi pada desa Kuhanga, kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ichsan gorontalo .

dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis megharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun dari bapak ibu dosen demi kesempurnaan skripsi penulis .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.E.,M.Si selaku Ketua Yayasan pengembangan ilmu pegetahuan dan teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Arman S.sos.,M.Si selaku Pembimbing I sekaigus Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik .

4. Bapak Marten Nusi S.IP., M.AP selaku Pembimbing II

Yang selalu meluangkan waktu dan selalu sabar memberikan bimbingan,motivasi serta arahan kepada penulis sehingga penulis dengan segala keterbatasan dapat menyelesaikan skripsi ini .

5. Ibu Darmawaty Abd Razak S.IP.,M.AP selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan

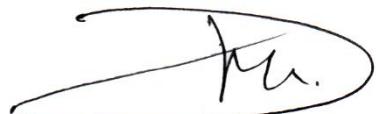
6. Bapak Ismail K Sanggilang selaku Kepala Desa Kuhanga Beserta Perangkat nya yang telah memberikan izin penelitian guna kelengkapan data skripsi penulis .

Teristimewah kepada keluarga besar saya Ibu Wahida Mahadin yang selalu senantiasa memberikan restu serta doa yang tulus kepada saya hingga sampai pada fase dimana saya telah mentunaikan amanat nya dengan sebuah gelar sarjana strata I ,Bapak Sahlan Mamonto S.Ag yang selalu sabar memberikan dorongan semangat,motivasi,serta arahan sampai dengan saat ini

Kepada Istri dan Putra Kecilku tercinta yang selalu ada dalam suka maupun duka dengan penuh semangat menemani saya sampai dengan saat ini .

Akhir kata terima kasih kepada kalian semua atas bantuan dan partisipasinya baik moril maupun materil, penulis ucapkan terima kasih sedalam dalamnya semoga mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan yang maha kuasa Allah Swt.,Amin.

Gorontalo, 27 November 2021  
Penulis



Akbar Z. Mamonto  
Nim : S2114014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOtTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pengertian Peranan.....	7
2.2 Peran Pemimpin Pemerintahan .....	12
2.3 Pemberdayaan Masyarakat .....	18
2.4 Kerangka Pikir.....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Obyek Penelitian .....	27
3.2 Jenis Penelitian .....	27
3.3 Fokus Peneliti.....	28
3.4 Lokasi Penelitian.....	28
3.5 Informan Penelitian.....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Analisis Data.....	30

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
4.2	Hasil Penelitian.....	33
4.3	Pembahasan.....	44

**BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	47
5.2	Saran .....	48

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	49
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konsep pembangunan desa diera reformasi telah membawa dampak yang cukup signifikan pada segala aspek kehidupan masyarakat desa. pembangunan segala bidang tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam negara yang terdistribusikan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan. kebijakan tersebut dapat terlihat melalui program-program pembangunan yang sampai pada tingkat desa yang dirasakan oleh masyarakat. peran serta pemerintah dalam hal ini pemimpin sangatlah menentukan arah kebijakan pembangunan. dalam konteks ke indonesiaan, peran pemimpin pemerintahan dalam pembangunan sangat menjadi cerminan dari kesejahteraan masyarakat. lebih lagi bahwa distribusi kekuasaan dalam konteks desentralisasi dipahami sebagai mandat penting dari penjabaran undang-undang untuk dilaksanakan secara penuh oleh pejabat ekseskutif didaerah.

konsep otonomi daerah memiliki arah yang jelas tentang peranan dari masing-masing lembaga pemerintahan dalam rangka mencapai harapan, serta tujuan dari program peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk di dalamnya adalah bidang pemberdayaan masyarakat. pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam hal pengelolaan daerah melalui kebijakan-kebijakannya yang dapat mendorong percepatan pembangunan daerah, melalui pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

paradigma pembangunan dengan pelibatan masyarakat di dalamnya adalah konsep terkini yang mampu mendorong dan mempercepat pembangunan disuatu daerah, dalam rangka mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. namun hal yang tidak boleh terlupakan dalam proses pembangunan tersebut adalah pelibatan secara partisipatif dan menyeluruh dari unsur pengambil kebijakan. unsur pengambil kebijakan tersebut adalah pemerintah, baik pada level pusat, daerah, sampai pada tingkat desa.

Pada tingkatan pemerintahan yang paling dibawah seperti desa, memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam upaya untuk meningkatkan kemadirian masyarakat melalui program pemberdayaan. mengapa demikian, karena pemerintah desalah yang menjadi ujung tombak keberhasilan dalam pembangunan nasional. pemerintah desa yang menjadi penerjemah program pemerintah pusat dengan tetap perpedoman pada ketentuan yang ada.

dalam undang-undang desa No. 06 Tahun 2014 telah tegas menyebutkan peran pemerintah desa, dimana dalam hal ini adalah kepala desa. pada prinsipnya kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, menyelenggarakan pembangunan, melaksanakan pembinaan, mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, serta melaksanakan pemberdayaan pada masyarakat.

melihat betapa besarnya tanggung jawab dari pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa sebagai penanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan, maka menjadi tanggung jawab mutlak bagi kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik, melalui kebijakan-kebijakan yang terarah dan dengan keterlibatan masyarakat secara langsung.

Fenomena umum yang berkembang bahwa program-program pemberdayaan pada tingkat pelaksanaan dilapangan masing kurang mendapatkan perhatian secara baik dari pemerintah. banyak masyarakat yang kurang mendapatkan sentuhan program pemberdayaan secara langsung dari pemerintah desa, program yang terkesan tebang pilih, serta tidak tepat sasaran menjadi fenomena umum tentang lemahnya peran kepala desa dalam menjalankan fungsinya. peranan kepala desa yang diharapkan menjadi optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan masih belum sesuai harapan.

Program pemberdayaan adalah satu diantara program pembangunan pemerintah yang mutlak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah desa, terkhusus kepala desa sebagai pemimpin di wilayah tersebut. ketersediaan sarana penunjang yang memadai belum dapat terpenuhi. faktor kelancaran komunikasi antara desa dengan masyarakat dan juga pihak diatasnya masih menjadi permasalahan tersendiri dalam tercapainya tujuan pemberdayaan.

fenomena umum tersebut juga sebagaimana terjadi pada pemerintah desa kuhanga, kecamatan bintauna, kabupaten bolaang mongondow utara. terdapat beberapa pelaksanaan program pemberdayaan yang kurang mendapatkan dukungan penuh dari desa. dukungan berupa pelibatan langsung masyarakat

dalam proses pengambilan keputusan, peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa pelatihan bagi kelompok usaha masyarakat masih terlihat belum maksimal dilakukan pendampingan, serta belum menjadi fokus dari pemerintah desa. program pemberdayaan pada tingkat desa secara umum sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah di fokuskan pada beberapa bentuk kegiatan, diantaranya adalah pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat yang bergerak di bidang usaha tertentu, bentuk sosialisasi tentang kesadaran hukum, pendampingan pada usaha kecil masyarakat, serta beberapa bentuk kegiatan lainnya.

Namun dalam pelaksanaannya, dalam hasil pengamatan bahwa program tersebut belum terlaksana dengan baik, padahal telah didukung oleh dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah kabupaten. secara faktual keterlibatan desa dalam memberikan arahan, pendampingan, serta pelayanan persuasif pada kelompok belum sepenuhnya dilakukan. olehnya responsifitas dan kemampuan aparatur pemerintah menjadi salah satu indikator penentu dalam pencapaian tujuan dari suatu program.

melihat beberapa fenomena yang dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul :

**“Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang yang ada, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini untuk menjawab fenomena empirik yang ditemukan dan dikaji lebih jauh, serta dianalisis. adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa kuhanga, kecamatan bintauna, kabupaten bolaang mongondow utara?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa kuhanga, kecamatan bintauna, kabupaten bolaang mongondow utara.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat secara akademis

diharapkan penelitian ini nantinya akan menjadi bagian pelengkap dari perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal peningkatan literasi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dalam fokus kajian yang sama.

#### 2. Manfaat secara praktis

hasil penelitian ini penulis berharap akan menjadi referensi bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa dalam menjalankan program pemberdayaan, serta sebagai rujukan bagi desa setempat dalam menjalankan

perannya sebagai unsur yang bertanggung jawab pada jalannya proses pembangunan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Peranan**

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa. status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan dengan peran. dan tidak ada peran tanpa kedudukan. manusia memiliki perannya masing-masing sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan sosial.

Menurut Rivai (2010) peran merupakan prilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak.

Sedangkan Levinson dalam Syani (2011) menguraikan peran ke dalam tiga cakupan. pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. kedua, peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. ketiga, peran juga

dapat dipandang sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2014, hal 212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Miftah Thoha (2012, hal. 10) mengatakan bahwa “peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan”.

Senada dengan Arifin, (2012: hal. 11) “mengelompokkan peran manajer ke dalam 3 peran, yakni:

- 1) Peran jembatan antar pribadi (*Interpersonal Roles*), meliputi peranan-peranan yang melibatkan hubungan dengan orang lain (para bawahan dan orang-orang di luar organisasi) dan aktivitas lainnya yang bersifat testimonial dan simbolis.
- 2) Peran penyambung informasi (*Informational Roles*), meliputi aktivitas-aktivitas pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. disini manajer berperan sebagai pengawas, penyebar berita, dan juru bicara.
- 3) Peran pengambil keputusan, mencakup hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penentuan pilihan. dalam kategori ini manajer dapat berperan sebagai pengusaha (*inisiator, enterprenuer*), pengentas kendala, pengalokasi sumber daya, dan perunding.

Peran pemerintah secara umum menurut kuncoro (2004, hal 110) “meliputi peran minimal, peran antara, dan peran aktif. peran minimal dapat berupa menyediakan barang-barang publik, pertahanan, keamanan, manajemen ekonomi, dan penyediaan fasilitas kesehatan. sementara peran antara dapat berupa perlindungan lingkungan, pendidikan dasar, pengatur kebijakan, mengendalikan informasi, perlindungan konsumen. peran aktif dapat berupa koordinasi kegiatan swasta, mendukung fungsi pasar, memberikan inisiatif.

kuncoro menjelaskan peran-peran pemerintah dapat terbagi sebagai: wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator.”

menurut Soejono Soekanto (2012, hal. 213) “peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :
  - a) Cara(*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
  - b) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
  - c) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
  - d) Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat.”
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasi dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.

Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. menurut Siswanto, (2012 hal. 76) “ada 4 ciri utama individu, yaitu:

1. Persepsi (*perception*) adalah peroses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
2. Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental yang di organisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.
3. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecendrungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.
4. Belajar adalah proses terjadinya prubahan yang relatif tetap dalam prilaku sebagai akibat dari praktek.”

berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

## **2.2 Peran Pemimpin Pemerintahan**

Sebagai dasar dalam membicarakan peran pemerintah, terlebih dahulu untuk membahas tentang fungsi pemerintah sendiri, dalam hal ini pemerintah lokal. Adapun fungsi dari pemerintah menurut UU Nomor 32 tahun 2004 yaitu:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.
- d. Dalam menjalankan fungsinya pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam berbagai urusan kecuali urusan pertahanan keamanan, moneter, kehakiman, hubungan luar negeri, dan agama (Arsiyah). kepala daerah dalam hal ini berperan sebagai alat daerah dan alat pemerintah pusat. sebagai alat daerah tugasnya adalah menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah; mewakili daerah didalam dan luar pengadilan; serta bersama-sama dengan DPRD membuat anggaran

pendapatan daerah atau peraturan daerah. Sedangkan sebagai alat pemerintah pusat kepala daerah mempunyai tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan persatuan bangsa; menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dan horizontal dengan masing-masing daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan; membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundangan dan peraturan daerah dijalankan oleh Instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah serta pejabat yang ditugaskan; melaksanakan segala tugas pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya; serta melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk tugas instansi lainnya.

Kaitannya dengan peran, seorang pemimpin idealnya memang mempunyai peran yang lebih banyak dibanding yang dipimpin. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kedudukan seseorang menentukan peran, atau peran menentukan kedudukan. artinya, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang, maka perannya pun juga semakin banyak. terkait dengan peran seorang pemimpin, Arifin (2012: hal. 114) “dalam bukunya *Leadership* menyebutkan beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu:

- 1) Sebagai penentu arah;
- 2) Sebagai wakil dan juru bicara organisasi;
- 3) Sebagai komunikator yang efektif;
- 4) Sebagai mediator; dan
- 5) Sebagai integrator”

Dalam kaitannya dengan pemerintah kedesaan, maka peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan dapat dilihat sebagai penentu arah. maksudnya disini adalah pemerintah memberikan poin-poin dan arahan- arahan kepada masyarakat dalam proses merumuskan perencanaan pembangunan. sementara dalam perannya sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hal ini dapat merujuk bahwa pemerintah desa melakukan koordinasi yang baik kepada seluruh *stakeholder* desa mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga ketua RT/RW. Sejalan dengan hal itu, pemerintah desa juga berperan sebagai komunikator yang efektif dengan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan. juga, sebagai mediator untuk menengahi konflik yang timbul dalam suatu proses rumusan perencanaan pembangunan. sementara sebagai integrator, pemerintah desa berperan untuk menyatukan kelompok-kelompok yang saling bertentangan agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Sebagai wirausaha, pemerintah berperan untuk mengembangkan potensi daerahnya untuk menciptakan peluang kerja. sedangkan sebagai koordinator peran pemerintah adalah mengkoordinasi berbagai kelompok kepentingan untuk merencanakan dan menetapkan progam pembangunan. sebagai fasilitator, pemerintah menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk

dikerucutkan pada satu tujuan yang jelas. sedangkan sebagai stimulator pemerintah menstimulasi masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan-tindakan khusus.

Kaitannya dengan pembangunan, Tjokroamidjojo (2011,hal.18) “memandang bahwa peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk: yakni sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sebagai pelayan masyarakat, serta sebagai *enterprenuer*. sebagai keamanan dan ketertiban merupakan peran pemerintah untuk menjaga kestabilan kondisi mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya.sebagai pelayan masyarakat, pemerintah menampung aspirasi masyarakat, memfasilitasi keinginan, menjadi mediator antar berbagai kepentingan sehingga pembangunan berjalan dengan baik. Sebagai *enterprenuer*, pemerintah mendorong masyarakat untuk menemukan berbagai inovasi, selain itu pemerintah disini berperan sebagai agen pembaharuan dalam pembangunan.”

Sementara itu Siagian (2012, hal. 142) “menguraikan beberapa peran pemerintah dalam pembangunan yaitu peran selaku stabilitor, peran selaku inovator, peran selaku modernisator, peran selaku pelopor, serta peran selaku pelaksana sendiri. pembangunan akan efektif bila situasi politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan kemanan dalam kondisi yang stabil. Jika aspek-aspek tersebut dalam kondisi yang labil, maka pembangunan terhambat bahkan tidak berjalan. dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk menstabilkan kondisi tersebut.”

dalam bidang politik, pemerintah mempunyai peran untuk menjamin tidak adanya konflik yang berkepanjangan baik dari dalam maupun dari luar. Konflik dari dalam dapat berupa kekuatan oposisi yang mementingkan kelompok sendiri atas nama rakyat, dan konflik dari luar dapat berupa pengaruh kuat dari negara lain untuk memantapkan hegemoninya. Disinilah pemerintah bertanggung jawab untuk memanajemen konflik dan menciptakan stabilitas dalam bidang tersebut.

Dalam menstabilkan kondisi ekonomi, peran pemerintah adalah mengupayakan kemungkinan terpeliharanya kondisi perekonomian dengan menstimulasi semangat kewirausahaan pada warganya, meningkatkan ketrampilan manajerial wirausaha, meningkatkan produktivitas (ketrampilan operasional, etos kerja, kedisiplinan, kecermatan, loyalitas) tenaga kerja. Jika kondisi ekonomi stabil, investor datang, lapangan usaha terbuka luas, jumlah pengangguran menurun, dan pembangunan berjalan dengan baik.

Stabilitas sosial-budaya juga sangat penting dalam pembangunan. Pemerintah dalam hal ini berperan untuk meminimalisir adanya gejolak sosial akibat adanya perubahan. sebagai inovator, peran pemerintah adalah harus mampu menjadi pelopor untuk menemukan metode baru, sistem baru, dan cara berpikir baru dalam pembangunan. jika peran tersebut di maksimalkan, maka pemerintah akan dapat menstimulasi dan mendorong masyarakatnya untuk menemukan inovasi-inovasi baru sehingga pembangunan berjalan baik.

melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Implikasinya adalah kuat dalam mempertahankan kedaulatan kemerdekaan dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara lain, mandiri, serta sederajat dengan negara lainnya. maka selaku modernisator, pemerintah mendorong warganya untuk melakukan proses modernisasi tersebut melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengolah dengan baik kekayaan alam yang dimiliki, menjadi sumberdaya yang produktif, dan hal itu dapat tercapai dengan terlebih dahulu mengimplementasikannya di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.

Pemerintah sebagai pelopor berperan untuk menjadi panutan warganya dalam bekerja produktif dan berdedikasi tinggi, kejujuran memberantas korupsi, penegakan disiplin kerja, ketataan pada aturan, kepedulian terhadap lingkungan, peningkatan efisiensi dengan tidak bergaya hidup boros, peningkatan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan. dengan kepeloporan tersebut masyarakat akan dengan mudah mengubah pandangan dan prilakunya untuk sesuai dengan pola-pola tersebut sehingga pembangunan berjalan dengan baik.

Adisasmita (2011, hal 11) lebih mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai status atau kedudukan yang dimilikinya dalam kehidupan masyarakat. peran seorang pemimpin tidaklah sama dengan peran orang yang dipimpin. peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan.

### **2.3 Pemberdayaan Masyarakat**

Berbagai program peningkatan kualitas hidup masyarakat telah dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberdayakan kehidupan warganya. upaya-upaya tersebut sebagai wujud konkret dari percepatan pembangunan manusia seutuhnya yang diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas, serta peningkatan ekonomi masyarakat. perwujudan dari program tersebut diaktualisasikan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*). pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” yang berarti memiliki atau

mempunyai daya. daya berarti kekuatan, berdaya berarti memiliki kekuatan. namun pada perkembangannya dari berbagai referensi dan bidang menunjukkan keragaman pengertian atas makna *empowerment* tersebut. *Empowerment* pada umumnya diterjemahkan kedalam istilah “pemberdayaan”. pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Saefullah, (2007, hal. 192) mengatakan bahwa “pemberdayaan merupakan upaya manajemen untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas pegawai dari keadaan yang ada sekarang atau dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya sehingga pegawai semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya. hal ini sejalan dengan pendapat Saefullah mengatakan bahwa ”semakin berdaya atau semakin memiliki kekuatan aparatur maka akan meningkatkan kemampuannya untuk menciptakan sikap profesionalisme dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya.”

Secara konseptual, Edi Suharto, (2015, hal. 57) “pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.”

pemberdayaan menurut Suhendra, (2006, hal. 74) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.”

menurut Moh. Ali Aziz (2005, Hal. 169) “pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.”

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaiakannya, (Tantan Hermansyah dkk, 2009:31). setelah kita memahami mengenai definisi pemberdayaan, selanjutnya akan dibahas mengenai definisi pemberdayaan masyarakat menurut para ahli.

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusia yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Secara lebih rinci Slamet (2003 : 49) menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.

istilah mampu disini mengandung makna : berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan menfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif. pemberdayaan juga memiliki makna menghidupkan kembali tatanan nilai, budaya, dan kearifan lokal dalam membangun jati dirinya sebagai individu dan masyarakat.

Indikator pemberdayaan menurut Soeharto (2011 : 50) paling tidak memiliki empat hal yaitu :

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif.
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Sedangkan dalam pelaksanaanya, pemberdayaan memiliki makna sebagai dorongan atau motivasi, bimbingan, serta pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri, upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah prilaku, mengubah kebiasaan lama menuju prilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. pemberdayaan juga memiliki makna kesetaraan, adil demokratis tanpa ada tekanan atau dominasi dalam suatu komunitas atau masyarakat. perbedaan karakter dan kemampuan individu adalah suatu keniscayaan. namun setiap individu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. realitas kesetaraan dan perbedaan individu ini akan menjadi prinsip dalam melakukan pemberdayaan, dengan demikian proses meningkatkan

Kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. fokus pemberdayaan dapat bersifat individu dan juga komunitas berarti proses meningkatkan kemampuan diri suatu komunitas dari suatu komunitas untuk dapat mengatur komunitasnya secara mandiri dan dilaksanakan secara

bersama-sama. pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses tersebut.

ambar teguh sulistiyan (2004, hal. 82) “Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku

Masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. kondisi afektif merupakan pemahaman terhadap sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.”

terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat:

### 1. Motivasi

Anggota masyarakat dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. masyarakat perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk

mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kedesanya. kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

## 2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan matapencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

## 3. Manajemen diri

Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

#### 4 .Mobilisasi sumber

Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang, jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

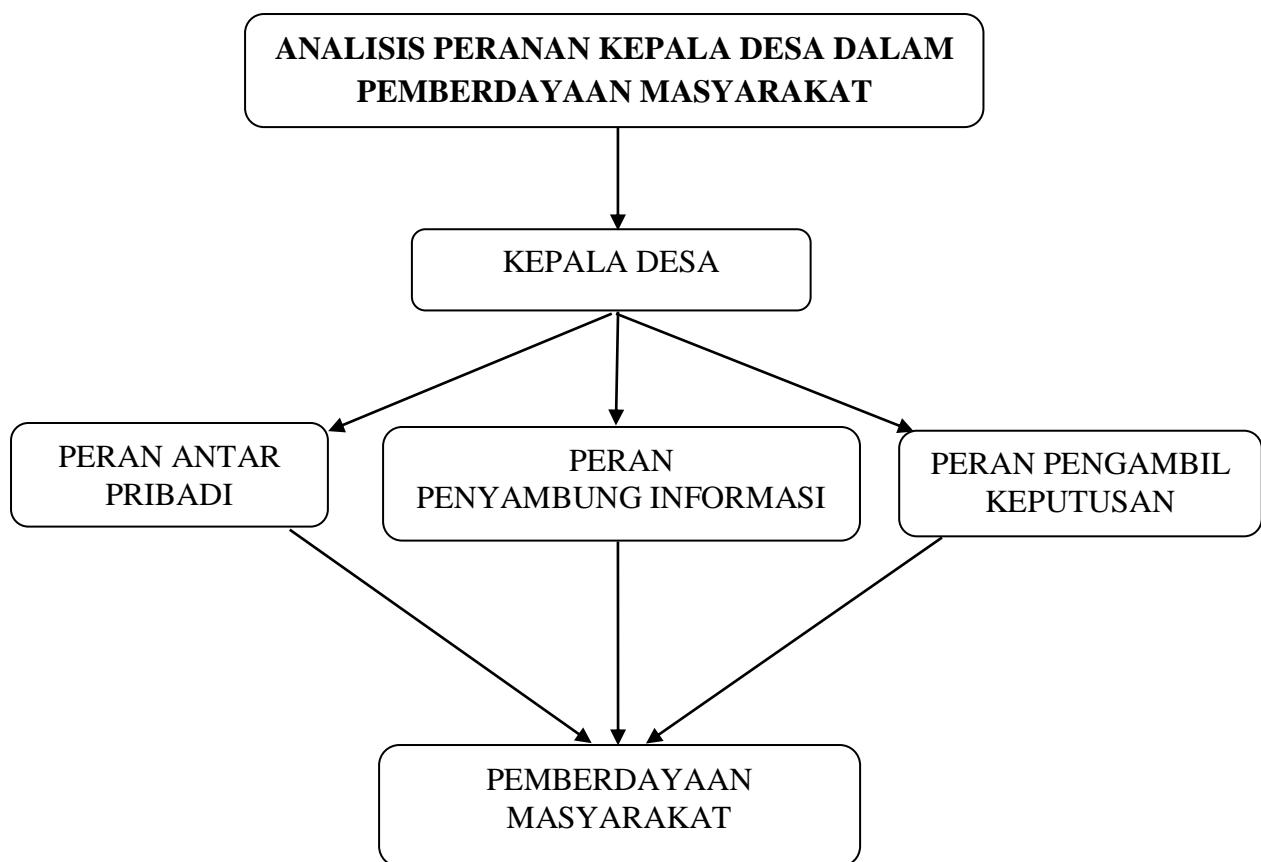
#### 5.Pembangunan dan pengembangan jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Tanggung jawab akan peningkatan hidup masyarakat telah menjadi beban pemerintah sebagaimana yang telah diamanahkan dalam undang-undang tentang tugas dan fungsi pemerintah sebagai unsur negara yang berkepentingan langsung dalam pembangunan manusia. program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dicanangkan secara umum telah mampu memberikan kontribusi aktif pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, baik dari sisi peningkatan ekonomi,

Maupun pada kemandirian masyarakat. pemerintah desa kuhanga salah satu unsur pemerintah desa di kabupaten bolaang mongondow utara yang turut serta menjalankan program pemberdayaan sebagai penjabaran dari program pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara melalui dana desa dengan menyarasi beberapa sektor kegiatan, seperti halnya pelatihan, pembekalan kerja, serta bentuk edukasi lainnya. pemberdayaan dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan pemerintah melalui program-program yang berorientasi pada peningkatan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.



## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Obyek Penelitian**

Berangkat dari permaslahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta penjelasan dari kerangka pikir, maka yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa kuhanga, kecamatan bintauna, kabupaten bolaang mongondow utara.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Pada umumnya penelitian yang bersifat naratif menekankan pada aspek penalaran mendalam dengan tujuan agar dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dari obyek yang sedang diteliti. berdasarkan hal tersur, maka jenis penelitian dalam usulan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, melalui pendekatan kualitatif. Lexy Maleong (2014, hal. 4) “ menjelaskan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif/gambaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Lexy Moleong (2014: 4), jenis penlitian kualitatif adalah sebagai model penelitian yang dapat menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan penelitian, serta perilaku dari objek yang diamati selama penelitian.

sedangkan metode kualitatif menurut Sugiyono (2005:1), metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, metode kualitatif digunakan

untuk mengecek data, melalui obsevasi dan wawancara guna memperkuat dan mengecek validasi data tersebut.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Selain menekankan pada hasil yang bersifat holistik, penelitian kualitatif juga menekankan pada kejelasan fokus penelitian yang menjadi titik penting untuk dijadikan bahan kajian yang relevan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Fokus akan menentukan batasan-batasan dari peneliti tentang apa yang akan dikaji dan di teliti lebih jauh, serta memungkinkan penulis untuk tetap terarah pada objek kajian pada saat pengumpulan data dan analisis data.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di kaji pada beberapa hal, yaitu :

- a. Peran antar pribadi
- b. Peran Penyambung Informasi
- c. Peran pengambil keputusan

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokus penelitian menjelaskan tentang dimana penulis melakukan penelitian atau dimana penelitian itu dilakukan. olehnya yang menjadi lokus atau lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di desa kuhanga, kecamatan bintauna, kabupaten bolaang mongondow utara.

### **3.5 Informan Penelitian**

Penentuan informan penelitian tidak berdasarkan pada keinginan semata dari penulis, namun mempertimbangkan faktor keterkaitan dengan orang yang

dianggap mengetahui pokok kajian yang sedang dilakukan, dengan Teknik purposive sampling, sehingga memudahkan perolehan informasi secara jelas dan dapat memudahkan penulis dalam pengumpulan informasi pada beberapa sumber berikutnya. olehnya yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Desa kuhanga
- 2) Sekretaris desa
- 3) Kaur pemerintahan
- 4) Unsur BPD

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya : wawancara, observasi dan dokumentasi. penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai mana dibawah ini :

#### **3.6.1 Wawancara**

Teknik wawancara didunakan untuk menjaring data dan informasi kualitatif secara langsung dari sumber data. wawancara di lakukan secara terbuka dengan tujuan agar peneliti dapat dengan leluasa mengembangkan pertanyaan yang muncul.

#### **3.6.2 Observasi**

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian melalui panca indra ini untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

### 3.6.3 Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengkaji data sekunder, kemudian mengumpulkannya, mencatat ataupun mempelajari dokumen-dokumen / arsip-arsip yang ada, yang terkait dengan penelitian. sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi atas dasar referensi buku maupun naskah yang ada.

## 3.7 Teknik Analisis Data

Analisa data ini dilakukan setelah data-data yang diperoleh terkumpul. dalam hal ini analisa data yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2005: 91–101) dengan mengutip pendapat miles dan huberman (1984), analisa data ini terdiri dari :

- *Data Reduction* (Reduksi data)

Proses pemilihan atau mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang didapat dari lokasi penelitian.

- *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. dalam arti pengorganisasian data menjadi sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

- Verifikasi (Menarik kesimpulan).

Kegiatan untuk menyimpulkan catatan-catatan dilapangan dimana kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penduduk desa kuhanga mula-mula berasal dari pedudukan atau pemukiman kecil yang tepatnya berada di belakang desa talaga sekarang. yang dihuni oleh suku bintauna asli dibawah kepemimpinan raja moegamat toraju datunsolang pada tahun 1910, oleh kebijakan kerajaan penghuni pedukuan ini dipindahkan ke bunonditi yang kemudian berkembang menjadi kampung kuhanga.

Pada saat itu, kampung kuhanga ini dihuni oleh suku/etnis gorontalo dan kemudian menyusul suku/etnis sangihe talaud. penghulu atau kepala pedukuan bunonditi pada waktu itu adalah abdullah datunsolang yang diangkat langsung oleh raja guna memimpin masyarakat menjalankan misi kerajaan untuk penanaman kelapa dan pembukaan lahan pertanian.

Desa kuhanga merupakan salah satu desa di kecamatan bintauna kabupaten bolaang mongondow utara, provinsi sulawesi utara, memiliki luas

217 ha. Secara geografis desa kuhanga berbatasan dengan wilayah sebagai berikut

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan laut Sulawesi
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan desa padang barat
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan desa mome
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan desa bunong

Secara administratif, wilayah desa kuhanga terdiri dari 4 dusun. secara umum tipologi desa kuhanga terdiri dari *persawahan, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan pariwisata*).

topografis desa kuhanga secara umum termasuk daerah *dataran tinggi*, dan berdasarkan ketinggian wilayah desa kuhanga diklasifikasikan kepada *dataran tinggi (0 – 100)*

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Peran Antara Pribadi**

Pelibatan pemimpin lokal dalam mendukung dan menjalankan fungsi kekuasaan dalam institusinya adalah suatu keharusan yang penting dilakukan dengan penuh tanggung jawab. mengingat bahwa tanpa peran dan kedudukan pemimpin, maka dapat dipastikan bahwa organisasi atau institusi tersebut tidak akan berjalan dengan baik, lebih lagi tujuan organisasi tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. hal yang sama juga penting untuk dilakukan pada pemerintah desa kuhanga. peran kepala desa dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan adalah hal yang perlu diusahakan dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, sehingga berdampak pada peningkatan hidup masyarakat yang ada di desa tersebut.

Peran antara pribadi dipahami adalah bagian dari proses pelibatan kepemimpinan kepala desa dalam upaya membangun hubungan antara pemimpin dan bawahan dalam organisasi pemerintahan, serta pihak luar sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap kebijakan atau program yang diambil. Peran antar pribadi menempatkan kepemimpinan menjadi simbol dan atau ukuran penilaian terhadap eksistensi organisasi dari pihak manapun, sehingga dukungan dan dorongan untuk pencapaian tujuan dari kebijakan dapat terwujudkan.

Hasil penelitian berupa wawancara yang peneliti temukan dilapangan berkaitan dengan peran antara pribadi kepala desa kuhanga dalam program pemberdayaan. diantara hasil wawancara tersebut yaitu .

hasil wawancara bersama kepala desa kuhanga bahwasanya :

“Saya secara pribadi selama ini dalam kepemimpinan saya, selalu mengedepankan prinsip komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik masyarakat, maupun aparat desa. dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan pembangunan ataupun pemberdayaan selama ini memang telah kami laksanakan dengan baik. banyak program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa ini”.

(Wawancara, 1 Maret 2021).

Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan seputar tugas dan tanggung jawab sangadi atau kepala desa yang menjelaskan :

“Secara normatif tugas sangadi yang kami pahami adalah pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan terhadap masyarakat desa kuhanga dan itu menurut kami telah kami lakukan. kami sadar protes dan kritik dari masyarakat itu pasti ada dan itu menjadi bahan evaluasi kami untuk menjadi lebih baik” (Wawancara, 1 Maret 2021).

Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama sekretaris desa kuhanga yang mengatakan bahwa :

“ Bapak kepala desa ini orangnya cukup mudah berinteraksi dengan siapapun, baik itu bawahannya, maupun masyarakat secara umum. saya melihat beliau cukup dihargai oleh masyarakat di desa ini dikarenakan selalu mengedepankan keinginan masyarakat. berkaitan dengan program pemberdayaan yang ada di desa ini, kepemimpinan kepala desa telah mampu memberikan

kepercayaan masyarakat untuk mendukung program tersebut berjalan dengan baik.” (Wawancara, 3 Maret 2021).

hal senada disampaikan oleh salah satu pegawai yang ada di desa kuhanga tentang peran antara pribadi kepala desa dalam program pemberdayaan :

“Sepengetahuan saya kepala desa selama ini telah memainkan peran yang cukup baik dalam melaksanakan program pemberdayaan di desa ini. pak kepala desa menjadi penghubung antara pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait, maupun masyarakat.” (Wawancara 3 Maret 2021).

Peneliti memperkuat hasil wawancara sebelumnya sebagaimana diatas dengan mewawancarai ketua BPD desa kuhanga tentang peran antara pribadi kepala desa, yang menjelaskan bahwa :

“kami sebagai mitra pemerintah desa kuhanga menilai bahwa kepemimpinan kepala desa ini telah membawa perubahan cukup baik bagi masyarakat setempat. kepala desa mampu menjadi simbol eksistensi dari lembaga pemerintahan yang mampu menumbuhkan semangat, serta perubahan bagi masyarakatnya. kepala desa ini cukup familiar, beliau cukup dikenal dan mampu membawa pengaruh baik masyarakat” (Wawancara, 3 Maret 2021).

Senada dengan informan-informan sebelumnya peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat desa kuhanga dengan pertanyaan yang sama. hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa :

“Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa selama ini cukup dapat dirasakan oleh masyarakat. mulai dari program UKM, program pelatihan dan penyuluhan dan lainnya. Saya sebagai warga juga turut merasakan

itu. kami menilai tidak terlepas dari peran penting bapak kepala desa yang selama ini telah memperjuangkan melalui dinas terkait, maupun kepada bapak bupati. peran beliau sangat dirasakan, namun kami juga berharap agar kedepan jauh lebih baik lagi, khususnya dalam pemerataan program” (Wawancara 5 Maret 2021). unsur masyarakat lainnya yang diwawancarai oleh peneliti terkait dengan peran kepala desa dalam program pemberdayaan juga menyebutkan bahwa :

“Saya secara pribadi menilai bahwa bapak kepala desa ini sudah bagus, artinya secara keseluruhan sudah memberikan perubahan, namun kalau bisa memberikan saran, saya hanya meminta bahwa kepala desa harus bisa berbuat adil pada pembagian dan pemanfaatan program-program pemberdayaan. misalnya bagi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan alat pertanian, maupun pinjaman modal untuk usaha kecil menengah. terdapat beberapa masyarakat yang menilai bahwa program itu tidak tepat sasaran dari sisi kelayakan penerima” (Wawancara 5 Maret 2021).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara bersama para informan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa kuhanga dalam menjalankan peran antar pribadi secara umum telah berjalan dengan baik. artinya dalam hal dimana hubungan antara kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan di desa kuhanga bersama masyarakat, serta pihak luar baik pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara, maupun pihak lain yang berpentina dengan program pemberdayaan telah tejalin dengan baik. kepala desa kuhanga telah menjadi simbol akan eksistensi kepemimpinan pemerintah kepala desa melalui langkah-langkah konkret yang dilakukan selama

ini, dilihat dari temuan penelitian yang ada, maka terdapat hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah desa berkaitan dengan kebijakan pemerataan tentang objek penerima program, sebagaimana yang terungkap dengan masyarakat yang diwawancara oleh peneliti.

#### **4.2.2 Peran Penyambung Inforomasi**

Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana penyelarasan kebijakan dengan kepentingan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan kebijakan. hal ini dimaksudkan bahwa orientasi penyelengraan pemerintahan secara keseluruhan itu diarahkan pada kepentingan peningkatan kehidupan dari masyarakat ada di wilayahnya, baik dalam lingkup pusat, daerah, sampai pada tingkat desa.

Olehnya sebagai perwujudan tersebut dibutuhkan seorang pemimpin pemerintahan yang mampu secara kapabilitas menerjemahkan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang kemudian diwujudkan kedalam bentuk kebijakan formal dan informal sehingga berimplikasi pada kepentingan masyarakat luas.

seorang pemimpin pada tingkat pemerintah terkecil, seperti kepala desa dibutuhkan kecakapan dalam membangun komunikasi yang baik, guna menghubungkan tujuan kebijakan atau program yang ingin dilaksanakan. Maka dalam konteks itu peran penyambung informasi seorang kepala desa sangat diperlukan dalam rangka memastikan informasi dapat tersampaikan secara konprehensif kepada masyarakat.

peran penyambung informasi seorang pemimpin sangat diperlukan dalam menjadi mediator terhadap seluruh kebijakan pemberdayaan yang ada dan kemudian

disalurkan melalui informasi yang tepat kepada masyarakat dan juga pola hubungan komunikasi antara masyarakat dengan pihak luar lainnya yang juga turut mendukung kebijakan pemberdayaan.

dalam kaitanya dengan deskripsi diatas tentang peran kepala desa sebagai penyambung informasi, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui peran kepala desa kuhanga sebagai penyambung informasi, khususnya berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat desa kuhanga.

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan tentang peran kepala desa kuhanga terhadap program pemberdayaan masyarakat, diperoleh sebagai berikut :

hasil penelitian peneliti bersama sekretaris desa kuhanga yang diwawancarai tentang peran kepala desa dalam menjalankan peran antar pribadi yang menyebutkan bahwa :

“bapak kepala desa selama ini sudah menjalankan prinsip kepemimpinannya melalui peran dalam menyampaikan informasi dan membangun komunikasi dengan baik pada semua lapisan masyarakat yang ada di desa ini. Setiap kebijakan pemberdayaan selama ini sudah disampaikan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan telihat memang masyarakat memberikan respon yang baik”. (Wawancara, 8 Maret 2021)

hasil wawancara lainnya yang peneliti temukan bersama kepala desa kuhanga sebagai informan pembading bagi peneliti dengan pertanyaan yang sama, yaitu

mengenai perannya dalam program pemberdayaan di desa kuhanga. dalam wawancara tersebut bapak kepala desa kuhanga menyampaikan bahwa :

“Saya pada dasarnya tidak mau menilai pribadi dan kinerja saya sendiri, karena yang menilainya adalah masyarakat dan pemerintah di atas saya. namun dalam menjalankan peran sebagai pimpinan di kepala desa ini, saya tentu harus melaksanakan tanggung jawab saya untuk memastikan seluruh program yang dicanangkan harus dilaksanakan dengan baik. olehnya sebagai kepala desa saya selalu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat guna menyaampaikan informasi-informasi penting berkaitan dengan program pemberdayaan”. (Wawancara, 8 Maret 2021).

Sejalan dengan apa yang disampaikan dengan informan sebelumnya, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah satu anggota BPD desa kuhanga tentang pandangan BPD terkait dengan peran kepala desa dalam menjalankan peran penyambung informasi yang mengatakan :

“Saya sendiri sebagai badan permusyawaratan desa di desa kuhanga yang merupakan bagian dari pemerintahan desa, khususnya dalam kaitannya dengan program-program pemberdayaan melihat bahwa kepala desa selama ini sudah aktif dalam membangun komunikasi dengan baik dengan semua elemen, baik masyarakat yang ada di desa ini, kami di BPD, serta pihak luar yang berkepentingan dengan program pemberdayaan” (Wawancara, 8 Maret 2021).

Pada kesempatan selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di desa kuhanga, diperoleh pernyataan dari informan sebagai berikut :

“Selama ini dalam penilaian saya kepala desa kuhanga memang selalu berkomunikasi dengan baik bersama masyarakat. Segala kebijakan yang dibuat selalu dilakukan sosialisasi melalui forum-forum musyawarah, baik dari tingkat lingkungan, maupun musyawarah di desa kuhanga. program-program yang selama ini dilaksanakan sudah cukup memberikan rasa kepuasan pada masyarakat. hanya saja perlu di perbaiki system informasi berupa model penyaluran dan penerima progam pemberdayaan. dimana saya sendiri melihat masih kurang transparan informasi yang dilakukan, masyarakat bertanya-tanya tentang ketepatan program dimasyarakat”. (Wawancara, 5 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan-informan sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa kuhanga sebagai penyambung informasi terhadap program-program pemerintah desa, khususnya berkaitan dengan program pemberdayaan telah terwujud dengan baik. Hal ini menunjukan bahwa kepala desa kuhanga mampu menjadi mediator terhadap kebijakan yang diambil dan mampu menjadi penghubung informasi kepada masyarakat, sehingga menimbulkan persepsi yang baik kepada masyarakat. Sekalipun terdapat pendapat masyarakat yang mengatakan bahawa diperlukan model komunikasi yang lebih transparan kepada masyarakat, sehingga tidak menyebabkan permasalahan baru dan menyebabkan tujuan program tidak tercapai.

#### **4.2.3 Peran Pengambil Keputusan**

Legitimasi kepelembagaan seseorang dalam satu organisasi salah satunya ditentukan oleh sejauh mana seorang pemimpin tersebut dapat berperan penting dalam proses lahirnya satu keputusan. arah kebijakan satu institusi memang memerlukan pemimpin yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan sebagai usaha konkret untuk memberikan dampak bagi institusi yang dipimpinnya, serta orang-orang disekitarnya yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama.

kepemimpinan kepala desa kuhanga dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya melalui kebijakan atau program pemberdayaan selama ini menurut beberapa informan yang diwawancara oleh peneliti sudah sangat terlihat.

peran kepala desa dalam proses pengambilan keputusan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat kuhanga selama ini sudah banyak terlihat melalui forum-forum musyawarah, serta model komunikasi lainnya. hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagaimana dibawah ini :

hasil wawancara bersama anggota badan permusyawaratan desa (BPD) desa kuhanga yang mengatakan bahwa :

“Dalam pengamatan kami selama ini kepala desa kuhanga cukup responsive dan sangat konsen dalam program-program pemberdayaan, apalagi program pemberdayaan saat ini adalah bagian dari program pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara. Selama ini dalam forum-forum musyawarah, bapak kepala desa memang terlihat sangat agresif dalam pengambilan keputusan. artinya keterlibatan kepala desa dalam pengambilan keputusan sangat terlihat.

kepala desa banyak memberikan arahan, masukan serta gagasan-gagasan yang progresif sehingga lahirlah keputusan yang tepat" (Wawancara, 8 Maret 2021). sejalan dengan pernyataan anggota BPD diatas, peneliti juga mewawancarai sekretaris desa kuhanga berkaitan dengan peran kepala desa dalam pengambilan keputusan, adapaun pernyataannya adalah :

“Selama kami menjadi sekretaris di desa kuhanga ini penilaian kami atas perannya dalam pengambilan keputusan itu sangat baik. kepala desa ini memang cukup aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. misalnya dirapat-rapat yang dilakukan baik yang dilakukan bersama aparat, maupun masyarakat, kepala desa sangat berperan untuk membuat satu keputusan yang tepat dalam realisasi program” (Wawancara, 8 Maret 2021)

hasil wawancara lainnya yang peneliti dapatkan bersama informan lain, yaitu salah satu masyarakat di desa kuhanga adalah:

“Kepala desa kuhanga ini menurut saya banyak memberikan sarah, masukan bahwa beliau tegas dalam mengambil keputusan. misalnya untuk program pemberdayaan bidang pertanian, saya sendiri melihat beliau sering menegaskan pada aparatnya untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan transparan pada program yang dilaksanakan.” (Wawancara , 9 Maret 2021).

Pernyataan lainnya diperoleh oleh peneliti melalui wawancara bersama satu masyarakat lainnya tentang peran kepala desa dalam pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat di desa Kuhanga, yang menyatakan :

“Kepala desa kuhanga ini orangnya cukup cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Saya menilai program pemberdayaan misalnya itu berjalan

dengan cukup baik, sekalipun ada masyarakat lain yang mengajukan protes atas ketidakjelasan pembagian bantuan pada masyarakat. namun saya harus adil menilai bahwa kepala desa kuhanga sudah cukup banyak melibatkan diri dalam pengambilan keputusan pada program pemberdayaan”. (Wawancara , 9 Maret 2021).

Salah seorang aparat di desa kuhanga yang diwawancarai oleh peneliti menyebutkan bahwa :

“Setiap kegiatan rapat dan musyawarah tentang program pemberdayaan yang dilaksanakan di kantor desa, bapak kepala desa selalu memimpin rapat dan memberikan banyak memberikan masukan berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan. beliau dengan gagasannya selalu memberikan solusi jika terdapat kebuntuan dalam rapat” (Wawancara, 10 Maret 2021).

berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan diatas tentang peran kepala desa kuhanga dalam pengambilan keputusan, maka peneliti menyimpulkan bahwa, kepala desa kuhanga dalam kepemimpinnya telah mampu memberikan peran sentral dalam proses lahirnya satu keputusan. melalui beberapa forum musyawarah atau rapat yang dilaksanakan, kepala desa telah mampu memainkan peran sebagai pengambil keputusan dalam proses yang ada, baik berupa penyampaian ide atau gagasan, sampai pada penegasan terhadap satu bentuk keputusan yang diambil. berkaitan dengan keputusan dalam program pemberdayaan, dalam beberapa pernyataan disebutkan bahwa kepala desa Kuhanga secara aktif terlibat dalam proses lahirnya satu keputusan penting yang dapat memberikan implikasi yang baik pada pelaksanaan program.

### **4.3 Pembahasan**

Model kepemimpinan pemerintahan saat ini diarahkan pada upaya percepatan pembangunan seutuhnya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. melalui jajaran diabwahnya pemerintah daerah kabupaten dan kabupaten pelaksanaan berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada program-program konkret dengan pelibatan masyarakat secara utuh. Pelibatan masyarakat tersebut adalah melalui pemberian stimulus bantuan yang dikelola masyarakat sendiri, misalnya melalui pemberian bantuan modal usaha, perbengkelan, pelatihan dan penyuluhan, sampai pada penyediaan lapangan kerja yang dapat dikelola secara langsung oleh masyarakat.

peran pemerintah desa sebagai penerjemah dari kebijakan pemerintah daerah harus secara maksimal untuk melaksanakan kebijakan tersebut diwilayahnya masing-masing, yang tanggung jawabnya diberikan kepada kepala desa. melalui peran dari kepala desa berdasarkan pemaparan temuan penelitian yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya telah memberikan gambaran faktual bagaimana peran kepala desa kuhanga yang dipotret pada tiga indikator peran,yaitu peran antara pribadi, peran penyampai informasi dan peran pengambil keputusan.

ketiga Indikator peran yang dijadikan fokus oleh peneliti dalam melihat hal-hal yang faktual dilapangan menunjukan bahwa peran kepala desa dalam program pemberdayaan telah berjalan sebagaimana mestinya, data wawancara yang

dipaparkan telah menunjukkan bahwa kepala desa kuhanga dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan telah mampu mewujudkan pencapaian program yang dicanangkan dengan peran aktifnya

Berkenaan dengan peran dalam intuisi atau organisasi dalam upaya mewujudkan kebijakan organisasi, Arifin (2012: hal. 11) telah memberikan konsep tentang peran yang ditekankan pada tiga aspek penting, yaitu peran antara pribadi yang menyangkut tentang bagaimana seorang pemimpin mampu menjadi penghubung tentang konsep-konsep kebijakan yang diambil dengan selalu berhubungan dengan internal dalam organisasinya, maupun dengan pihak eksternal. hal lainnya adalah peran penyampai informasi, dimaskudnkan bahwa peran seorang pemimpin dalam menterjemahkan keinginannya, atau keinginan dari kebijakan intitusi secara kelmabagaan kepada pihak luar menjadi penting untuk dilaksanakan dengan secara transparan dan maksimal. pemimpin harus menjadi mediator dalam sebagala informasi dalam rangka membangun kominukasi yang baik dan efektif dengan pihak luar, khususnya masyarakat ketika hal itu bersentuhan dengan organisasi pemerintahan. hal ketiga adalah berkaitan dengan peran pengambil keputusan dalam hal konteks ini seorang pemimpin organisasi privat, maupun pemerintahan harus dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh institusinya. dimana salah satu indokator kepemimpinan yang efektif itu salah satunya diukur oleh sejauh mana seorang pemimpin mampu memainkan peran aktif dalam proses lahirnya satu keputusan yang dapat membawa perubahan bagi lingkungan sekitarnya. Secara keseluruhan, ketiga indikator yang dijelaskan oleh Arifin (2012: hal. 11)

diatas menekankan pada keberhasilan kepemimpinan personal seseorang yang dapat menjadi barometer penilai kelembagaan secara keseluruhan, baik yang menyangkut tentang sumber daya manusianya, maupun relaisasi kebijakan yang telah diprogramkan. berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diukur berdasarkan fakta temuan penelitian pelaksanaan program pemebrdayaan masyarakat di desa kuhanga telah mampu memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kehidupan masyarakat melalui keterlibatan peran kepala desa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang peran kepala desa kuhanga dalam program pemberdayaan masyarakat, maka terdapat kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah peran kepala desa dalam program pemberdayaan masyarakat di desa kuhanga secara umum jika diukur melalui tiga indikator dari teori atau konsep peran, maka terlihat kepala desa telah menjalankan nya dengan cukup baik. peran sebagai penghubung atau membangun hubungan secara struktural dan sosial dengan lingkungan desa telah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi konsep dasar dari peran personal kepala desa. mulai dari peran antara pribadi, peran penyampai informasi, sampai dengan peran pengambil keputusan. program pemberdayaan yang dilaksanakan di desa

kuhanga dalam temuan peneltian telah membawa dampak pada kepentingan masyarakat sekitar. dalam temuan penelitian terungkap juga model komunikasi dalam kaitanya dengan teknis pelaksanaan program dinilai masyarakat belum berjalan dengan baik. Sistem transparansi kebijakan perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan sistem.

## 5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada beberapa objek, yaitu pemerintah desa kuhanga, khususnya kepala desa untuk dapat terus berkomitmen dalam menjalankan perannya dalam setiap program yang dicanangkan untuk mewujudkan keberhasilan tujuan program. dukungan aparat desa setempat juga harus terus ada pada kepala desanya melalui motivasi atau komunikasi persuasif sehingga mampu meningkatkan kepemimpinan personal dan kelembagaan yang akan bedampak pada penilaian yang baik dan maksimal dari pemerintahan diatasnya dan masyarakat yang dipimpinnya. Selbihnya adalah pada mekanisme penetapan objek penerima program harus mengedepankan aspek pemerataan dan pemanfaatan yang jelas pada sasaran yang sebenarnya, serta model komunikasi yang trasnparan harus diciptakan guna membangun kepercayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta. 1984.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Miftah, Thoha, 2012. *Perilaku Organisasi Konsep dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siswanto. 2012. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bumi Aksara dan Perilaku. BPFE. Yogyakarta.
- Saefullah, 2007. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum Yang Baik*, Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Sumedang. FISIP UNPAD.
- Shendra, K. 2006. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan <asyarakat. Bandung. STKSPRESS

## **PEDOMAN WAWANCARA**

- ❖ Dokumen RKPDES atau RPJMDesa (jika ada)
- ❖ Dokumen profil Desa (Sejarah Desa, Visi dan Misi, jumlah penduduk, dll).
- ❖ Foto-foto wawancara
- ❖ Wawancara :
  1. Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi kepala desa dalam program pemberdayaan masyarakat? (ditanya ke kepala desa)
  2. Sejauh ini seperti apa program pemberdayaan di desa ini? (ditanya ke kepala desa)
  3. Sebagai kepala desa bagaimana perannya dalam pembangunan d desa ini ? (ditanya ke Kepala desa)
  4. Bagaimana hubungan komunikasi dan emosional anatar kepala desa dan aparat selama ini? (ditanya ke kepala desa)
  5. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan di desa ini? (ditanya ke kepala desa)
  6. Sejauh ini apakah kepala desa berperan dalam program pembangunan atau pemberdayaan masyarakat di desa ini? (ditanya ke aparat desa)
  7. Apa saja peran kepala desa dalam pembangunan atau pemberdayaan? (ditanya ke aparat desa)
  8. Dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan, bagaimana sikap kepala desa selama ini? (ditanya ke aparat desa)
  9. Apakah kepala desa selalu aktif dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan? (ditanya ke aparat desa)
  10. Bagaimana masyarakat melihat peran kepala desa selama ini dalam pembangunan? (tanya ke masyarakat)
  11. Adakah sikap dan tugas kepala desa yang dilihat kurang dalam kaitannya dengan pemerintah desa? (tanya ke masyarakat)
  12. Apakah kepala desa dilihat berperan aktif dalam prses pengambilan keputusan pembangunan di desa? (tanya ke masyarakat)

## DOKUMENTASI WAWANCARA





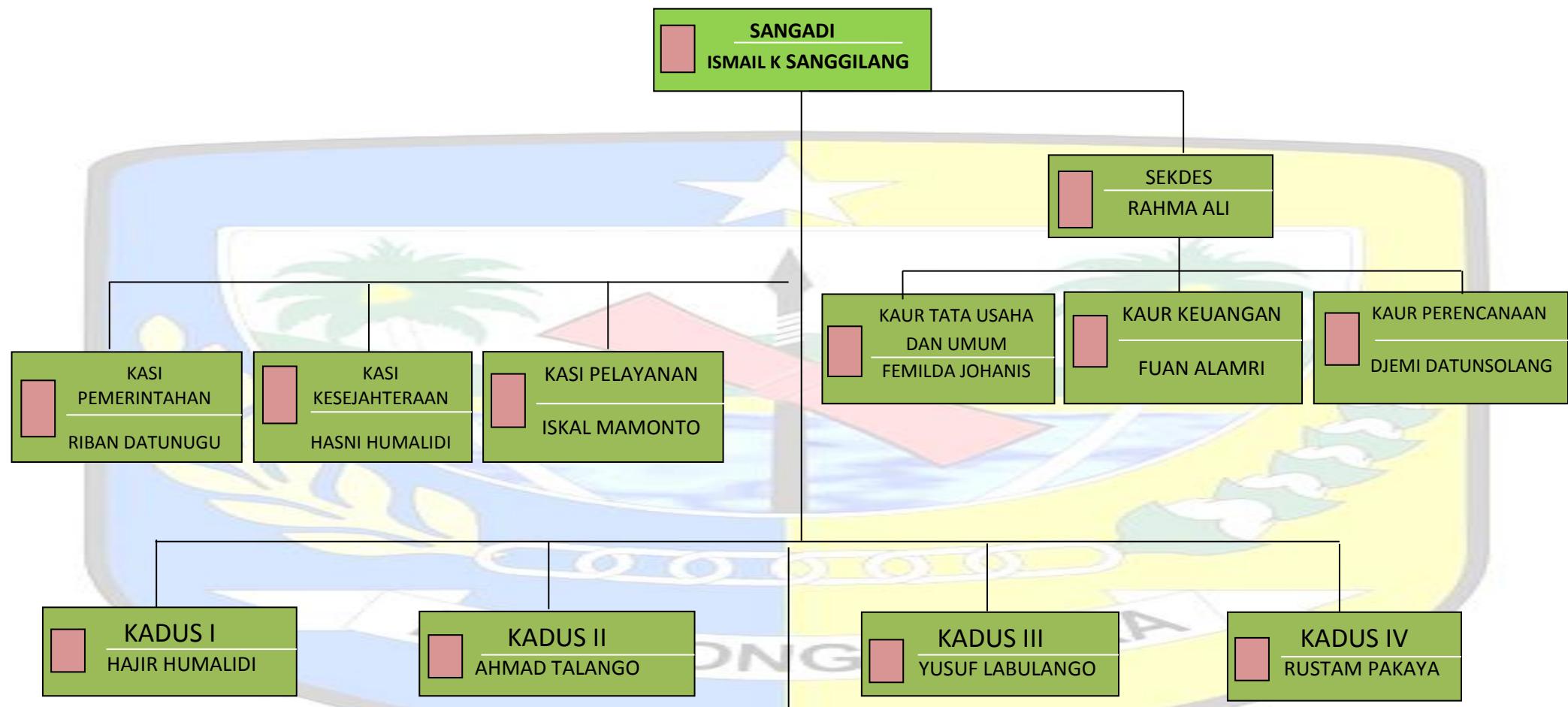






## PEMERINTAH DESA KUHANGA KECAMATAN BINTAUNA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

### STRUKTUR PEMERINTAH DESA KUHANGA



## ABSTRAK

### **AKBAR Z. MAMONTO. S2114014. ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA DESA KUHANGA, KECAMATAN BINTAUNA, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA)**

Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan analisis jalur yang mengedepankan aspek narasi deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan peran kepala desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Kuhanga secara umum jika diukur melalui tiga indikator dari teori atau konsep peran, maka terlihat kepala desa telah menjalankannya dengan cukup baik. Peran sebagai penghubung atau membangun hubungan secara struktural dan sosial dengan lingkungan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi konsep dasar dari peran personal kepala desa. Mulai dari peran antara pribadi, peran penyampai informasi, sampai dengan peran pengambil keputusan. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah kepala desa dapat terus berkomitmen dalam menjalankan perannya dalam setiap program yang dicanangkan untuk mewujudkan keberhasilan tujuan program. Dukungan aparat pemerintah desa setempat juga harus terus ada pada kepala desa melalui motivasi atau komunikasi persuasif, sehingga mampu meningkatkan kepemimpinan personal dan kelembagaan yang akan bedampak pada penilaian yang baik dan maksimal dari pemerintahan di atasnya dan masyarakat yang dipimpinnya.

Kata kunci: peran kepala desa, pemberdayaan masyarakat



## ***ABSTRACT***

### ***AKBAR Z. MAMONTO. S2114014. THE ANALYSIS OF THE VILLAGE HEAD'S ROLE IN COMMUNITY EMPOWERMENT (A STUDY AT KUHANGA VILLAGE, BINTAUNA DISTRICT, NORTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY)***

*This study aims to determine the role of the village head in community empowerment in Kuhanga Village, Bintauna District, North Bolaang Mongondow Regency. This study is conducted with a qualitative method. The data collection technique uses interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is through a path analysis approach that puts forward descriptive narrative aspects. The results of the study indicate that the village head's role in the community empowerment program at Kuhanga Village is measured through three indicators of the theory or concept of the role. The village head has carried it out well. The role as a mediator or building a structural and social relationship with the village head has been running following the basic concept of the village head's role. It starts from the role amongst individuals, conveying information role through decision-makers role. The recommendation given by the researcher is that the village head can continue to be committed to carrying out his role in every program launched to realize the success of the program's goals. The support of local village government officials must also continue to be with the village head through motivation or persuasive communication, to be able to improve personal and institutional leadership which will have an impact on a good and maximum assessment of the government above it and the community the village head leads.*

*Keywords: village head's role, community empowerment*





**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
KECAMATAN BINTAUNA  
DESA KUHANGA**

*Jln. Trans Sulawesi No . Desa Kuhanga Kecamatan Bintauna Kode Pos 95763*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/2004/DK/265/V/2021

Sehubungan surat permohonan izin penelitian dari ketua lembaga penelitian universitas ichsan gorontalo

Nomor : 3549/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Hal : izin permohonan penelitian tertanggal 5 Februari 2021 maka kepala desa menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Akbar Zulkarnain Mamonto

Nim : S2114014

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Benar telah mengadakan penelitian di kantor desa kuhanga terhitung mulai bulan Februari s/d Mei 2021 guna melengkapi data pada penyusunan Proposal/Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Demikian surat keterangan ini di buat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya



Tembusan :

1.Arsip -



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

**Nomor : 3549/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021**

**Lampiran : -**

**Hal : Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada Yth,**

**Kepala Desa Kuhanga**

**di,-**

**Tempat**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama : Zulham, Ph.D**  
**NIDN : 0911108104**  
**Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian**

**Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :**

**Nama Mahasiswa : Akbar Zulkarnain Mamonto**  
**NIM : S2114014**  
**Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik**  
**Program Studi : Ilmu Pemerintahan**  
**Lokasi Penelitian : DESA KUHANGA KECAMATAN BINTAUNA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**Judul Penelitian : ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.**



**+**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**



SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0960/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : AKBAR ZULKARNAIN MAMONTO  
NIM : S2114014  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Analisis Peranan kepala desa dalam pembeedayaan masyarakat

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 23 November 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI\_S.21.14.014, Akbar Z. Mamonto. Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bool...

Nov 23, 2021

7931 words / 55335 characters

S.21.14.014

## SKRIPSI\_S.21.14.014, Akbar Z. Mamonto. Peranan Kepala Desa Da..

### Sources Overview

**30%**

OVERALL SIMILARITY

1	eprints.umsida.ac.id INTERNET	15%
2	www.scribd.com INTERNET	5%
3	repository.uinsu.ac.id INTERNET	4%
4	repository.uin-suska.ac.id INTERNET	3%
5	elib.unikom.ac.id INTERNET	1%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id INTERNET	<1%
7	repository.uhn.ac.id INTERNET	<1%
8	Desi Intan Romadhona, Muhlasin Amrullah. "Strategy for SMA Muhammadiyah 3 Pandaan in Learning during the Covid-19 Pandemic", ... CROSSREF	<1%
9	text-id.123dok.com INTERNET	<1%

### Excluded search repositories:

Submitted Works

### Excluded from document:

Bibliography

Quotes

Small Matches (less than 20 words)

### Excluded sources:

None

# CURRICULUM VITAE

## Identitas Pribadi

Nama : Akbar Zulkarnain Mamonto  
Nim : S2114014  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Tahuna 16 Januari 1995  
Agama : Islam  
Status : Menikah



Nama Istri : Firly Firginia Manuhabel S.Pi  
Nama Anak : Cahyo Cakra Mamonto

Nama Orang Tua  
Ayah : Sahlan Mamonto S.Ag  
Ibu : Wahidah Mahadin

Saudara Kandung  
Nama Adik : Hikma Wahyuni Mamonto S.Pd  
: Jenesia Maudina Mamonto A.Md.keb  
: Jelita Utami Mamonto

Pendidikan Formal :

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Lulus	Tempat	Ket-
1	SDN 1 Kuhanga	2001-2007	Bolaang Mongondow Utara	Berijazah
2	SMP/MTS Alkhairat Bintauna	2007-2010	Bolaang Mongondow Utara	Berijazah
3	SMA/MA Alkhairat Bintauna	2010-2013	Bolaang Mongondow Utara	Berijazah